

**ANALISIS YURIDIS INSKONSTITUSIONAL
BERSYARAT UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA (STUDY
KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 91/PUU-XVIII/2020)**

SKRIPSI



Oleh:

Argo Vidi Arnanda

NPM: 17.81.0221

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)
MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI
BANJARMASIN**

2022

ABSTRAK

Argo Vidi Arnanda. NPM. 17.81.0221. Analisis Yuridis Inkonstitusional Bersyarat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Study kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020). Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB. Pembimbing I. Dr., H. Maksu., S.H., M.H., Pembimbing II., Dr., Indah Dewi Megasari., S.HI., M.HI.

Kata Kunci: *Cipta Kerja. Omnibuslaw. Inkonstitusional Bersyarat*

Pada tahun 2020 yang lalu di hebohkan dengan aksi masa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dengan konsep baru yaitu omnibuslaw, yang di dalam pembentukannya mencakup berbagai undang-undang sekaligus yang juga termasuk Undang-Undang cipta kerja, sehingga menuai kontroversi oleh beberapa kalangan akademis, buruh serta kalangan masyarakat juga mahasiswa, penolakan demi penolakan yang dapat di lihat dari aksi masa di depan gedung Dewan perwakilan rakyat yang kemudian tidak menghasilkan hasil apapun untuk penolakan konsep omnibuslaw sehingga kemudian di sahkan nya undang-undang cipta kerja dengan sistem pembentukan omnibuslaw itu,

Penelitian ini memfokuskan dengan rumusan masalah Apakah Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Sudah Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Bagaimana Prosedur Yang Harus Dilakukan Agar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Tidak Cacat Formil.

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah jenis penelitian hukum normatif. dengan menggunakan beberapa pendekatan, yakni: pertama, pendekatan perundang-undangan statute approach. Kedua, pendekatan konseptual conceptual approach. Ketiga pendekatan studi kasus Case Approach dan menggunakan bahan hukum menggunakan metode studi literatur yang meliputi peraturan perundang-undangan terkait pengaturan pembentukan undang-undang, buku-buku, penelitian, jurnal,

Dari penelitian ini memperoleh hasil Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja dengan metode omnibuslaw tidak memiliki kepastian hukum dalam pembentukannya tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, serta melanggar asas-asas perundang-undangan yang baik sehingga dapat di nyatakan cacat formil,. Pembentukan undang-undang agar tidak cacat formil terutama dalam pembentukan undang-undang no 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, dalam pembentukannya harus dengan berdasarkan dengan amanat undang-undang dasar nri 1945 yaitu undang-undang no 12 tahun 2011 tentang peraturan pembentukan undang-undang yang juga mengatur tentang tahapan-tahapan dari perencanaan, pembahasan, penetapan dan pengundangan serta asas-asas dalam pembentukannya tidak boleh dilewatkan satu pun karena bersifat kumulatif yang mana apabila terlewatkan satu tahapan atau satu asas dalam pembentukannya dapat di nyatakan cacat formil, Adapun juga dalam hasil putusan mahkamah konstitusi undang-undang cipta kerja dapat di nyatakan konstitusional dan tidak cacat formil dengan cara melakukan perbaikan selama 2 tahun setelah putusan ini di tetapkan,

ABSTRACT

Argo Vidi Arnanda. NPM. 17.81.0221. 2020. Analisis Yuridis Inkonstitusional Bersyarat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Study kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020). Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB. Pembimbing I. Dr., H. Maksu., S.H., M.H., Pembimbing II., Dr., Indah Dewi Megasari., S.HI., M.HI.

Keywords: Job Creation. Omnibuslaw. Conditionally Unconstitutional.

In 2020 there was a stir with mass action in the formation of laws and regulations with a new concept, namely omnibuslaw, which in its formation included various laws as well as including the work copyright law, thus reaping controversy by several academic circles, laborers as well as the community as well as students, rejection after rejection which can be seen from the mass action in front of the People's Representative Council building which then did not produce any results for the rejection of the omnibus law concept so that the work creation law was later ratified with the omnibus law formation system,

This research focuses on the formulation of the problem whether the Formation of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation is in accordance with Law Number 15 of 2019 concerning Amendments to the Law on the Establishment of Legislation and What Procedures Must Be Done for Law No. 11 of 2020 concerning Formal Non-Disabled Job Creation.

The type of research conducted by the researcher is the type of normative legal research. by using several approaches, namely: first, the approach to legislation statute approach. Second, the conceptual approach conceptual approach. The three case study approaches are Case Approach and use legal materials using a literature study method which includes laws and regulations related to the regulation of the formation of laws, books, research, journals, and other relevant sources of writing. The collection of legal materials above is carried out by means of document studies, namely reviewing, reviewing and studying legal materials that are related to this research.

From this study, the results obtained that the formation of law no. 11 of 2020 concerning job creation with the omnibuslaw method does not have legal certainty in its formation, it is not in accordance with law no. 12 of 2011 concerning the formation of laws and regulations, and violates the principles of legislation. which is good so that it can be declared formally flawed, which is then also stated with the results of the decision of the constitutional court which states that the law on copyright work is formally flawed and conditionally unconstitutional. The formation of a law so that it is not formally flawed, especially in the formation of Law No. 11 of 2020 concerning job creation, in its formation must be based on the mandate of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, namely Law No. 12 of 2011 concerning Regulations for the Establishment of a Law that also regulates the stages of planning, discussion, stipulation and promulgation as well as the principles in their formation. the constitutional court of the work copyright law can be declared constitutional and not formally disabled by making improvements for 2 years after this decision is stipulated,

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abu Daud Busroh, 2001, Sistem Pemerintahan Republik Indonesia, (Jakarta: Bina Aksara.
- Azhary, 1995, Negara Hukum Indonesia, UI Press, Cetakan Pertama, Jakarta.
- Antonius Ansokhi, Antonia Panca, Dan Yohanes Babari, 2003, Relasi Dengan Sesama Jakarta, Gramedia.
- AV Dicey Dalam I Dewa Gede Palguna, 2015, Teori Konstitusi & Konsep Negara Hukum, Malang: Setara Press.
- Dahlan Thaib, Jazim Hamii, Ni'matul Huda, 2004, Teori dan Hukum Konstitusi, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada
- Hans Kelsen, Teori Tentang Hukum, diterjemahkan oleh Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2006 Jakarta : Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
- Jimly Asshiddiqie, 2007, Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: PT Bhuana ilmu populer.
- Jimly Asshiddiqie, 2010, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.
- Jimly Asshiddiqie, 2005, Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara, Jakarta:Kompres,
- Johan Jasin, 2014, Hukum Tata Negara Suatu Pengantar, Yogyakarta, Deepublish.
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y, 2019. Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. Jurnal Crepido,
- Maruarar Siahaan, 2011, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika, 2011.
- Maruarar Siahaan, 2006, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI
- Moh mahfud MD, 2000, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta.
- Megawati Dan Ali Murtopo, 2006, Parlemen Bikameral Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Universitas Michigan, UAD Press.
- Miriam Budiardjo, 1998, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Garamedia Pustaka Utama.
- Ni**Matul Huda, 2010, Ilmu Negara, jakarta:Rajawali Press.
- Padmo Wahjono, 1977, Ilmu Negara Suatu Sistematis Dan Penjelasan 14 Teori Ilmu Negara Dari Jellinek, Melati Study Group, Jakarta.
- Philippus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia, Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Ridwan HR, 2002, Hukum Administrasi Negara, Jakarta:Rajawali Pers.
- Satjipto Rahardjo, 2003, Sisi-Sisi Lain Hukum di Indonesia, Jakarta, Penerbit Buku Kompas,
- Saldi Isra, 2010, Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka dan Bertanggung Jawab di Mahkamah Agung, Jakarta: Jurnal Nasional.
- Sudarsono. 1992. Kamus Hukum, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta
- Sjachran Basah, 1992 Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara, Bandung: Alumni.
- Soegito, 2005, Rule Of Law, Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan Dan Ketenagaan Perguruan Tinggi, Jakarta.
- Sri Soemantri, 2016, Prosedur Dan Sistem Perubahannya sebelum dan sesudah UUD 1945, Alumni, Bandung.
- Sri Soemantri, 1989, Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945, Alumni, Bandung
- Sudargo Gautama, 1973, Pengertian Tentang Negara Hukum, Bandung, Alumni,

Tim Penyusun, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI
Tim Penyusun kamus 1991, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka Edisi kedua,
Yuliandri, 2009, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik, Jakarta, Rajagrafindo Persada
Zulkarnain Rildwan, 2011, dalam Jurnal Konstitusi, Kompetensi Hakim Konstitusi dalam penafsiran konstitusi Jakarta: MK

B. Karya Ilmiah

Disertasi Saldi Isra, 2009, Pergeseran Fungsi Legislasi Dalam System Pemerintahan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta,
Todd Garvey, 2017, A Brief Overview of Rulemaking and Judicial Review, Congressional Research Service
Mariyadi Faqih, 2010. Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat, Jurnal Konstitusi Volume 7 Nomor 3.
Jimly Asshiddiqie, Gagasan Negara Hukum Indonesia, Makalah.
Luthvi Febryka Nola, Penerapan Omnibus Law Dalam Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia, Kajian Vol. 25, No. 3, Tahun 2020.
Antoni Putra, Penggunaan Pendekatan Omnibus Law dalam Penyusunan Peraturan Pemerintah , Jurnal Vol 19 No. 2 - Juni 2022.

C. Website

Jimly Asshiddiqie, Gagasan Negara Hukum Indonesia, Makalah.
http://www.jimly.com/makalah/namafile/57/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf,
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/negara>,
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Zainal Arifin Mochtar Sebut Pelanggaran dalam Pembentukan UU Cipta Kerja,
<https://www.mkri.id/index.php?id=17454&menu=2&page=web.Berita>,

Kompas.TV, “Demi Legalkan UU Cipta Kerja, DPR Dituding 'Rekayasa' Revisi

Regulasi Lain”, <https://www.kompas.tv/bbc/280347/demi-legalkan-uu- cipta-kerja-dpr-dituding-rekayasa-revisi-regulasi-lain?page=all>.

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Undang No 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan;

Undang-Undang No 30 Tahun 2002 Sebagaimana Di Ubah Dengan Undang-Undang No 19

Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 PUU 2020;

Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat;

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.